

Pemahaman Agama dan Partisipasi Politik Santri: Studi Korelasional di Pesantren KH. Zainal Musthafa Sukamanah, Tasikmalaya

Dede Imam Muharrom^{a, 1*}, Karim Suryadi^{a, 2}, Sri Wahyuni Tanszhil^{a, 2}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ demmhrr@upi.edu*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 5 Juni 2025;

Revised: 23 Juni 2025;

Accepted: 7 Juli 2025.

Kata-kata kunci:

Pemahaman Agama;
Partisipasi Politik;
Santri;
Pemilih Pemula;
Pesantren.

: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pemahaman agama dan partisipasi politik santri sebagai pemilih pemula di Pesantren KH. Zainal Musthafa Sukamanah, Kabupaten Tasikmalaya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya peran santri dalam proses demokrasi serta masih terbatasnya kajian kuantitatif yang mengkaji keterkaitan antara nilai-nilai keagamaan dan partisipasi politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert yang disebarkan kepada 64 santri sebagai responden. Analisis data menggunakan uji Pearson menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara pemahaman agama dan partisipasi politik santri ($r = 0,265$; $p = 0,034$). Meskipun tingkat korelasi tergolong lemah, temuan ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai keagamaan memberikan kontribusi terhadap kesadaran dan keterlibatan politik santri. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pendidikan politik berbasis nilai-nilai Islam di lingkungan pesantren. Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah sampel dan cakupan lokasi yang sempit. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan multivariat dengan cakupan yang lebih luas untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika partisipasi politik santri.

ABSTRACT

Religious Understanding and Political Participation of Santri: A Correlational Study at KH. Zainal Musthafa Islamic Boarding School, Sukamanah, Tasikmalaya. This study aims to analyze the relationship between religious understanding and political participation among santri (Islamic boarding school students) as first-time voters at KH. Zainal Musthafa Islamic Boarding School in Sukamanah, Tasikmalaya Regency. The background of this research highlights the crucial role of santri in democratic processes and the limited number of quantitative studies examining the link between religious values and political participation. A quantitative approach with a correlational design was employed. Data were collected through a Likert-scale questionnaire distributed to 64 respondents. Pearson correlation analysis revealed a positive and significant relationship between religious understanding and political participation among the santri ($r = 0.265$; $p = 0.034$). Although the correlation is relatively weak, the findings suggest that religious values contribute to the political awareness of santri. These results underscore the importance of political education grounded in Islamic values within the pesantren environment. The study is limited by its small sample size and narrow geographic scope. Future research is recommended to apply multivariate approaches with broader coverage to gain a more comprehensive understanding of the dynamics of santri political participation.

Copyright © 2025 (Dede Imam Muharrom, dkk). All Right Reserved

How to Cite: Muharrom, D. I., Suryadi, K., & Tanszhil, S. W. Pemahaman Agama dan Partisipasi Politik Santri: Studi Korelasional di Pesantren KH. Zainal Musthafa Sukamanah, Tasikmalaya. *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 5(3), 79–88. <https://doi.org/10.56393/antropocene.v5i3.3423>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Partisipasi rakyat dalam pemerintahan merupakan inti dari sistem demokrasi yang dianut di berbagai negara di dunia. Namun, dalam dekade terakhir demokrasi global menghadapi tantangan serius. Laporan *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) menyatakan bahwa hingga tahun 2021, hampir setengah dari 173 negara mengalami penurunan pada setidaknya satu subatribut demokrasi (IDEA, 2022). Dalam konteks Indonesia, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Mohammad Hatta menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat berarti pemerintahan oleh rakyat, yakni kekuasaan untuk mengelola negara berada di tangan rakyat atau pemimpin yang mendapat kepercayaan rakyat (Fahmi, 2016). Sejalan dengan prinsip tersebut, Indonesia menerapkan sistem demokrasi konstitusional, yaitu sistem pemerintahan yang dibatasi oleh hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan terhadap warga negara (Rowa, 2015). Salah satu bentuk nyata dari perwujudan demokrasi ini adalah adanya penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).

Pemilihan umum berfungsi sebagai sarana utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu merupakan instrumen demokratis untuk memilih wakil rakyat dan pemerintah berlandaskan pada Pancasila serta Undang Uundang Dasar (UUD) 1945. Dengan ketentuan hukum ini, rakyat diharapkan aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik, termasuk memberikan suara dalam pemilu. Partisipasi rakyat dalam aktivitas politik ini menjadi hal yang substansial di negara demokrasi. Hal ini dikarenakan tingkat partisipasi politik menjadi tolok ukur penting dalam mengukur kualitas demokrasi. Partisipasi politik yang tinggi menunjukkan antusiasme masyarakat dalam proses politik, sedangkan partisipasi yang rendah menunjukkan gejala ketidakpedulian terhadap politik bahkan menjadi indikasi kurangnya perhatian rakyat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan (Nur Wardhani, 2018). Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana dilansir Kompas.com, tingkat partisipasi pemilih nasional pada pemilu 2014 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada pemilu 2014 hanya sebesar 69,6%, pemilu 2019 naik signifikan menjadi 81,9%, sedangkan pada pemilu 2024 mengalami penurunan sekitar 0,12% menjadi 81,78% (Mantalean & Prabowo, 2024). Meski demikian, partisipasi politik ini tidak selalu merata di seluruh segmen masyarakat, terutama di kalangan pemilih pemula. Oleh karena itu, mendorong keterlibatan politik di tingkat lokal, khususnya di lingkungan pesantren menjadi semakin relevan untuk diperhatikan.

Partisipasi politik didefinisikan oleh Samuel P. Huntington sebagai aktivitas warga negara dalam sebuah negara yang bertindak sebagai individu maupun kelompok dengan tujuan memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan pemerintah (Iqbal, 2020). Konsep ini menegaskan bagaimana individu berperan dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan kehidupan masyarakat banyak. Dengan begitu, partisipasi politik ini mencerminkan keberdayaan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam sistem demokrasi (Budiardjo, 2008). Namun, tingkat partisipasi politik seringkali dipengaruhi oleh pemahaman politik yang dimiliki seseorang. Individu yang memiliki pemahaman politik yang baik akan memandang bahwa pemilu yang menjadi salah satu bentuk partisipasi politik sebagai media untuk ikut terlibat dalam menentukan arah kebijakan publik ke depan. Sebab, partisipasi politik dalam pemilu dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan (Arniti, 2020). Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Sementara itu, individu yang kurang memahami politik apalagi tidak memiliki minat terhadap politik akan cenderung memandang pemilu hanya sebagai ritual formal pemilihan pemimpin belaka.

Berkenaan dengan hal ini, Angell dalam (Eviany, 2019) merumuskan berbagai faktor yang dapat memengaruhi tingkat partisipasi seseorang. Ia menyebutkan bahwa kecenderungan seseorang berpartisipasi dalam aktivitas politik dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, serta lamanya tinggal atau lingkungan. Jika berbicara tentang usia, maka salah satu

kelompok yang terlibat dalam aktivitas politik seperti pemilu adalah pemilih pemula. Pemilih pemula merupakan kelompok pemilih yang pertama kali mendapatkan hak pilih dalam pemilu atau mereka yang pada hari pemungutan suara berusia 17 tahun atau lebih dan sebelumnya bukan termasuk pemilih berdasarkan ketentuan undang-undang. Kelompok pemilih pemula senantiasa menjadi kelompok paling potensial dalam perhelatan pemilihan umum dari masa ke masa. Pada Pemilu 2024, jumlah pemilih muda secara nasional mencapai 46.800.161 orang, atau 22,85% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh KPU (Muhamad, 2023). Di Kabupaten Tasikmalaya sendiri terdapat 150.970 pemilih pemula dari total 1.423.477 pemilih (Perdana, 2023).

Tingginya jumlah pemilih pemula pada Pemilu 2024 ini menegaskan potensi besar mereka dalam menentukan arah kebijakan bangsa ke depan. Namun, potensi jumlah pemilih yang tinggi ini dihadapkan pada dua kondisi berlawanan, yaitu antusiasme dan apatisme politik. Di satu sisi, antusiasme pemilih pemula terhadap pemilu dipengaruhi oleh media sosial yang kini semakin massif dalam memberikan informasi terkait isu-isu politik, namun di sisi lain pemahaman mereka yang minim terhadap politik serta perilaku aktor politik yang tidak merepresentasikan sebagai tokoh publik yang baik menjadi pendorong apatisme politik mereka (Eviany, 2019). Di sinilah nilai-nilai agama dapat memainkan peran penting sebagai faktor pendorong partisipasi politik yang lebih substansial. (Sunaryo, 2020) menegaskan bahwa agama memiliki legitimasi untuk hadir dalam ruang publik dan politik, selama disampaikan secara rasional dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan demokratis.

Senada dengan itu, (Lawolo, n.d.) mengungkapkan bahwa pluralitas agama di negara-negara demokratis menciptakan dinamika sosial-politik yang kompleks, namun juga membuka peluang bagi institusi agama untuk mengambil peran aktif dalam membentuk arah kebijakan publik, terutama di jalur pendidikan dan partisipasi politik warga. Bahkan, menurut (Sonjaya & Rahayu Diningrat, 2023), agama dan kekuasaan di Indonesia memiliki relasi yang saling memengaruhi, di mana agama menjadi inti kekuasaan dan kekuasaan menjadi inti agama. Lebih lanjut (Jayanti, 2025) menjelaskan bahwa dalam perspektif politik Islam, agama merupakan sistem hidup yang menyeluruh (*way of life*) yang mencakup dimensi kenegaraan dan politik. Islam tidak mengenal pemisahan antara ruang sakral dan sekuler, sehingga pemahaman keagamaan yang kuat berpotensi mendorong keterlibatan politik yang lebih etis dan substantif.

Dalam konteks pemilih pemula di pesantren, pemahaman agama dapat menjadi kekuatan yang membentuk kesadaran politik yang kritis, inklusif, dan bertanggung jawab. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik menelaah hubungan antara pemahaman agama dan partisipasi politik santri sebagai pemilih pemula di lingkungan pesantren. Beberapa kajian sebelumnya cenderung memisahkan analisis antara pendidikan agama dan partisipasi politik. Studi terdahulu juga telah ada yang membahas faktor-faktor partisipasi politik secara umum, namun belum banyak yang menyoroti bagaimana pemahaman agama khususnya di lingkungan pesantren berpengaruh terhadap partisipasi politik santri. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi hubungan antara pemahaman agama dan partisipasi politik santri.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional tertua di Indonesia memiliki kontribusi historis yang signifikan dalam membentuk pemahaman agama sekaligus kesadaran berbangsa. Salah satunya adalah Pesantren KH. Zainal Musthafa Sukamanah yang merupakan pesantren yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan kemerdekaan, sekaligus dikenal konsisten dalam menanamkan nilai-nilai keislaman dan nasionalisme kepada para santrinya. Dengan karakteristik tersebut menjadikan pesantren ini relevan untuk dijadikan studi kasus dalam meneliti relasi antara agama dan politik. Santri sebagai sosok yang dalam kesehariannya mengkaji kitab-kitab agama sekaligus diinternalisasikan nilai-nilai agama pada dirinya mesti didorong keterlibatannya dalam kehidupan publik (Sunaryo, 2020). Di Indonesia sendiri, pendekatan agama sering digunakan untuk mendorong stabilitas politik. Bahkan dalam situasi krisis, pemimpin agama seringkali diminta untuk memberikan dukungan moral dan menenangkan masyarakat (Akmal et al., 2024). Contohnya seperti ketika terjadi kerusuhan sosial akibat

aktivitas politik, pemimpin agama memainkan peran penting dalam proses mediasi dan penyelesaian konflik. Oleh karena itu, penelitian mengenai hubungan antara pemahaman agama dan partisipasi politik santri ini tidak hanya penting secara praktis sebagai gambaran kondisi sosial-politik santri saat ini, tetapi juga memiliki kontribusi teoritis dalam memperkaya kajian hubungan antara agama dan politik dalam konteks pendidikan Islam kontemporer.

Untuk memperluas perspektif, *civic engagement* dijadikan sebagai kerangka konseptual yang fundamental dalam kaitannya dengan partisipasi politik generasi muda. *Civic engagement* dipahami sebagai serangkaian tindakan individu atau kelompok yang bertujuan mengidentifikasi dan menangani isu publik yang bersifat sukarela dan konstruktif (Sihombing et al., 2025). Dalam konteks ini, *civic engagement* bukan sebagai kesadaran pasif, melainkan fondasi bagi partisipasi politik substantif. Melalui keterlibatan dalam forum publik, advokasi isu, dan kegiatan komunitas, warga negara termasuk santri berlatih berpikir kritis, membangun jaringan sosial, dan membiasakan diri mengambil peran dalam ranah publik. Tahapan tersebut menjadi pijakan penting sebelum mereka berpartisipasi dalam pemilihan umum atau proses kebijakan formal. Berkaitan dengan hal tersebut, pemahaman agama santri juga dapat memainkan peran penting dalam mendorong *civic engagement* mereka berlandaskan nilai moral yang kuat. Dengan pemahaman agama yang mendalam, santri tidak hanya menjadi sadar masalah publik, tetapi juga terdorong untuk berpartisipasi secara etis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji hubungan antara pemahaman agama dan partisipasi politik santri dalam menghadapi pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat yang berakar dari *civic engagement* berprinsip religius.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pemahaman agama dan partisipasi politik santri di Pesantren KH. Zainal Musthafa Sukamanah Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan ini dapat memberikan gambaran empirik mengenai peran nilai-nilai agama dalam membentuk kesadaran dan keterlibatan politik di kalangan santri serta memberikan kontribusi terhadap penguatan pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai-nilai religius di lingkungan pesantren.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai tingkat korelasi hubungan antara pemahaman agama dan partisipasi politik santri. Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk menentukan signifikansi dan kekuatan hubungan antara keduanya. Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara menyebar angket kuesioner skala Likert (skala 1-5) yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya dengan menggunakan analisis korelasi item-total. Semua butir pernyataan pada instrumen dinyatakan valid karena nilai r hitung antara 0,446 hingga 0,710 yang semuanya melebihi r tabel (0,361) dan juga terbukti reliabel ditunjukkan oleh nilai *Cronbach's Alpha* berkisar antara 0,870 hingga 0,879 yang semuanya $> 0,60$. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dari hasil kuesioner yang disebar kepada santri di Pesantren KH. Zainal Musthafa Sukamanah Kabupaten Tasikmalaya yang berusia 17-21 tahun dan/atau memenuhi syarat sebagai pemilih pemula pada pemilu 2024 dengan populasi sebanyak 179 orang dan sampel yang dipilih sebanyak 64 responden dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *stratified sampling*. Analisis data pada penelitian ini dilakukan menggunakan uji korelasi *Pearson Product Moment* karena data terdistribusi normal dengan bantuan program SPSS versi 27.0. Tujuannya untuk mengetahui arah, kekuatan, dan signifikansi hubungan antara dua variabel tersebut. Penelitian dengan *single-site study* dengan memilih Pesantren KH. Zainal Musthafa Sukamanah sebagai lokasi karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena hubungan antara pemahaman agama dan partisipasi politik santri dalam konteks aslinya. Pesantren ini dipilih karena memiliki karakter historis dan ideologisnya yang dikenal sebagai basis perjuangan kemerdekaan dan konsisten menanamkan nilai keagamaan serta nasionalisme sehingga relevan untuk mengkaji keterkaitan antara agama dan partisipasi politik.

Hasil dan Pembahasan

Hasil pengisian angket oleh 64 responden dianalisis dan dikelompokkan ke dalam lima kategori tingkat pemahaman, yakni mulai dari kategori rendah hingga sangat tinggi. Distribusi tingkat pemahaman agama santri dari hasil angket tersebut tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 1. Distribusi Tingkat Pemahaman Agama Santri

Kategori	Rentang Skor	Jumlah Responden	Persentase (%)
Sangat Tinggi	42 – 50	45	70,3%
Tinggi	34 – 41	18	28,1%
Sedang	26 – 33	1	1,5%
Rendah	18 – 25	0	0%
Sangat Rendah	10 – 17	0	0%
Total		64	99,9%

Berdasarkan hasil analisis data kuesioner, sebagian besar responden memiliki pemahaman agama yang baik yaitu berada pada kategori sangat tinggi dengan persentase 70,30% pada rentang skor 42-50. Sementara sisanya, 28,1% responden memiliki tingkat pemahaman agama yang tinggi pada rentang skor 34-41, dan hanya 1,5% responden yang memiliki pemahaman agama pada kategori sedang, yaitu pada rentang skor 26-33. Skor rata-rata pemahaman agama adalah 43,2 dengan standar deviasi sebesar 4,7, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan rentang skor 42 hingga 50.

Dari data yang diperoleh dari hasil angket, tingkat partisipasi politik santri kemudian diklasifikasikan ke dalam lima kategori. Distribusi masing-masing kategori partisipasi politik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Distribusi Tingkat Partisipasi Politik Santri

Kategori	Rentang Skor	Jumlah Responden	Persentase (%)
Sangat Tinggi	42 – 50	10	15,5%
Tinggi	34 – 41	30	46,8%
Sedang	26 – 33	23	35,9%
Rendah	18 – 25	1	1,5%
Sangat Rendah	10 – 17	0	0%
Total		64	99,7%

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar responden memiliki tingkat partisipasi yang baik, yaitu berada pada kategori tinggi dengan persentase 46,8% pada rentang skor 34-41. Sementara sisanya, ada yang berada pada tingkat partisipasi sangat tinggi, yaitu dengan persentase 15,5% pada rentang skor 42-50, ada juga yang berada pada kategori sedang, yaitu dengan persentase 35,9% pada rentang skor 26-33. Selain itu, ada juga yang berada pada tingkat partisipasi politik rendah, yaitu dengan persentase 1,5% pada rentang skor 17-25. Skor rata-rata partisipasi politik santri adalah 36,8 dengan standar deviasi sebesar 5,1, termasuk dalam kategori tinggi dengan rentang skor 34 hingga 41.

Selanjutnya, untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, yaitu pemahaman agama dan partisipasi politik santri dilakukan uji korelasi menggunakan *Pearson Product Moment* yang berfungsi untuk melihat derajat hubungan linear antara kedua variabel. Hipotesisnya adalah jika nilai Sig. < 0,05, maka H_0 ditolak, artinya terdapat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai Sig. > 0,05, maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Berikut hasil uji korelasi *Pearson Product Moment* dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 27.0.

Tabel 3. Korelasi Pearson Antara Pemahaman Agama dan Partisipasi Politik

<i>Correlations</i>		Pemahaman Agama	Partisipasi Politik
Pemahaman Agama	Pearson Correlation	1	.265*
	Sig. (2-tailed)		.034
	N	64	64
Partisipasi Politik	Pearson Correlation	.265*	1
	Sig. (2-tailed)	.034	
	N	64	64

*. *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*

Berdasarkan tabel hasil uji korelasi Pearson tersebut, diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,265 dengan nilai signifikansi (p) sebesar 0,034. Karena $p < 0,05$, maka terdapat hubungan positif dan signifikan secara statistik antara pemahaman agama dan partisipasi politik santri. Temuan ini memberikan dasar untuk meninjau lebih dalam makna hubungan tersebut dalam konteks pendidikan pesantren dan nilai-nilai keagamaan.

Untuk mengukur hubungan antara pemahaman agama dengan partisipasi politik santri, sebelumnya diukur terlebih dahulu tingkat pemahaman agama dan partisipasi politik santri secara terpisah. Pemahaman agama dalam penelitian ini diukur melalui empat indikator utama yang dirumuskan berdasarkan nilai-nilai yang relevan dengan politik, yaitu keadilan, amanah, tanggung jawab, dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai agama yang paling relevan dengan aktivitas politik. Sebagaimana disebutkan oleh (Lavan, 2021) bahwa dinamika politik Indonesia yang mengalami perkembangan zaman di dalamnya terdapat nilai-nilai Islam yang ada dan perlu dijalankan. Maka menurutnya, penanaman nilai-nilai Islam dalam perkembangan politik Indonesia perlu dilakukan karena dapat dijadikan sebagai sebuah acuan dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia.

Adapun tingkat partisipasi politik santri diukur berdasarkan lima indikator utama, yaitu minat terhadap isu politik, pemahaman hak dan kewajiban politik, ikut serta dalam sosialisasi politik, keterlibatan dalam organisasi politik, dan partisipasi dalam pemilihan umum. Minat terhadap isu politik dan pemahaman hak dan kewajiban politik menjadi indikator kesadaran politik yang bermuara pada partisipasi politik. Sebab menurut Ramlan Surbakti dalam (Yulanda et al., 2024) kesadaran politik merujuk pada pemahaman seseorang tentang hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Hal tersebut mencakup perhatian serta minat individu pada isu-isu sosial serta politik yang ada di lingkungannya. Sementara itu, indikator ikut serta dalam sosialisasi politik yang di dalamnya terdapat disukusi politik dan keterlibatan dalam organisasi politik baik berupa partai politik, lembaga pemerintah, atau yang lainnya menjadi indikator yang menarik untuk dibahas berkenaan dengan santri dan pesantren. Sebab kurangnya pemahaman tentang struktur politik, isu-isu sosial, dan kebijakan publik dapat membatasi kapasitas mereka untuk ikut serta dalam diskusi politik atau organisasi politik (Clara & Manalu, 2024). Kondisi ini seringkali dimanfaatkan oleh para aktor politik dengan menjadikan kelemahan santri dan pesantren yang kebanyakan belum intens dalam melakukan sosialisasi politik dan terlibat dalam organisasi politik sebagai basis untuk meraup suara tanpa diperhatikan kepentingannya. Adapun indikator penggunaan hak pilih dalam pemilu menjadi indikator utama dalam penelitian ini, sebab dipandang sebagai salah satu praktik nyata dalam partisipasi politik.

Hasil korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan secara statistik antara pemahaman agama dan partisipasi politik santri. Meskipun nilai korelasi sebesar 0,265 tergolong lemah menurut klasifikasi statistik, hal ini tidak serta merta menghilangkan relevansi substansinya. Dalam konteks pendidikan pesantren, hubungan yang lemah ini tetap penting untuk diperhatikan karena

menunjukkan adanya kontribusi nilai-nilai keagamaan terhadap perilaku politik, meskipun bukan satu-satunya determinan. Hubungan positif antara pemahaman agama dan partisipasi politik santri dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman agama seseorang maka cenderung diikuti oleh peningkatan partisipasi politik. Sebaliknya, rendahnya pemahaman agama yang dimiliki seseorang dapat berdampak pula pada penurunan tingkat partisipasi politiknya. Temuan ini merefleksikan bahwa ajaran agama bukan hanya membentuk moral personal, tetapi juga memiliki implikasi terhadap kesadaran kolektif dalam ranah publik.

Dengan nilai signifikansi yang berada di bawah ambang 0,05, hipotesis nol dapat ditolak, dan hipotesis alternatif yang menyatakan adanya hubungan antar variabel dapat diterima. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa pemahaman agama memainkan peran penting dalam membangun kesadaran dan partisipasi politik santri. Penelitian ini memperluas pemahaman mengenai hubungan antara agama dan politik dalam konteks pendidikan pesantren yang sebelumnya jarang dikaji secara kuantitatif. Temuan ini memberikan kontribusi teoritis dalam menyoroti peran internalisasi nilai agama sebagai dimensi penting dalam studi *civic-religious engagement*, yang selama ini lebih banyak dikaji dalam pendekatan kualitatif atau etnografis.

Temuan ini juga sejalan dengan studi (Arif et al., 2024) yang mengungkapkan bahwa perubahan kebijakan politik dapat memicu pergeseran pemahaman keagamaan dan berdampak pada bentuk partisipasi politik. Dalam konteks komunitas Samin, kebijakan otoritarian mendorong apatisisme politik, sementara kebijakan yang lebih inklusif memicu konversi religius dan keterlibatan politik yang lebih aktif. Hal ini menguatkan bahwa internalisasi nilai agama baik melalui pendidikan maupun konteks struktural, memiliki pengaruh terhadap orientasi politik masyarakat, termasuk santri di lingkungan pesantren.

Temuan ini juga memperlihatkan bahwa pendidikan dan lingkungan pesantren memberikan kontribusi kuat dalam pembentukan nilai-nilai keagamaan santri yang menjadi modal penting dalam perilaku sosial dan politik mereka. Secara umum, santri di Pesantren KH. Zainal Musthafa Sukamanah sebagai pemilih pemula memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi berdasarkan indikator yang ditetapkan. Fakta ini memperkuat asumsi bahwa lingkungan keagamaan tidak selalu menjadi penghambat keterlibatan politik, melainkan dapat menjadi ruang reproduksi kesadaran santri. Hal ini sejalan dengan teori bahwa agama berperan dalam membentuk identitas sosial masyarakat. Agama tidak hanya menjadi sumber ajaran dan keyakinan spiritual, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai, norma, dan perilaku sosial dalam masyarakat (Achmad et al., 2023). Nilai-nilai keagamaan tersebut mendorong keterlibatan individu dalam kehidupan sosial dan politik sebagai bagian dari pengamalan ajaran agama. Ramayulis dalam (Irawan, 2022) menyebutkan bahwa ajaran agama menjadi standar berpikir dan bertindak bagi masyarakat. Dalam konteks politik, sistem nilai agama dapat menjadi sumber legitimasi dan arah tindakan, termasuk dalam membentuk preferensi dan partisipasi politik santri. Partisipasi politik santri mencakup beragam bentuk keterlibatan, mulai dari keterlibatan dalam pemilihan umum, diskusi politik, hingga aksi sosial yang berkaitan dengan isu-isu kebangsaan. Dengan pemahaman agama yang kuat, santri tidak hanya memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, tetapi juga mampu menginterpretasikan ajaran-ajaran Islam dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini juga diperkuat oleh temuan (Rahawarin, 2019) yang menunjukkan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki potensi besar dalam membentuk ideologi politik santri, terutama melalui penguatan nilai-nilai agama dan peran aktif kyai dalam memberikan arahan sosial-politik di era digital.

Temuan positif tentang pemahaman agama dan partisipasi politik santri ini sejalan dengan bukti global. Sebagai contoh, (Sika, 2016) dalam studi di Mesir menemukan fakta bahwa kaum muda Muslim yang berasal dari lingkungan pendidikan agama aktif terlibat dalam aksi sosial dan politik, baik melalui demonstrasi, advokasi isu publik, dan organisasi politik yang melampaui ranah formal pemilu. Ini menggambarkan pola *civic-religious engagement*, di mana nilai agama mendorong peran warga negara

dalam kehidupan politik secara nyata dan kritis. Temuan ini membuktikan bahwa religiusitas tidak menghambat partisipasi politik, melainkan dapat menjadi penopang penting *civic engagement* menuju keterlibatan publik dan politik, termasuk santri.

Namun, penting untuk menjadi catatan bahwa meskipun hubungan ini signifikan, kekuatan korelasinya hanya berada pada kategori cukup, sehingga pemahaman agama bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhi partisipasi politik santri. Temuan ini mengafirmasi pandangan Angell dalam (Eviany, 2019) yang mengidentifikasi faktor-faktor partisipasi seseorang. Di mana tingkat partisipasi seseorang turut dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, serta lamanya tinggal (lingkungan). Dengan begitu, peran pemahaman agama perlu dipandang sebagai satu dari sekian banyak elemen yang membentuk perilaku politik seseorang. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa perilaku politik bersifat multikausal dan dipengaruhi oleh berbagai dimensi. Oleh karena itu, temuan ini harus dipahami sebagai titik awal untuk eksplorasi lebih lanjut, bukan sebagai hasil final yang mutlak.

Berdasarkan penelitian ini, pemahaman agama menjadi salah satu faktor pendorong partisipasi politik seseorang yang bersifat internal. Sementara itu, banyak faktor lain yang bersifat eksternal juga turut memainkan peran penting, salah satunya adalah sosialisasi politik. Menurut (Supriati, 2014), melalui sosialisasi politik ini masyarakat memperoleh wawasan dan kepercayaan-kepercayaan sebagai suatu sikap politik yang selanjutnya untuk dapat mengadakan komunikasi politik sehingga dapat memengaruhi partisipasi mereka. Bagi mereka yang tidak mengikuti sosialisasi politik, kecenderungan mereka untuk terlibat dalam aktivitas politik menjadi lebih kecil. Ini juga dibuktikan dengan hasil penelitian dari (Liando, 2016) yang menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab masyarakat tidak berpartisipasi adalah lemahnya sosialisasi panitia *ad hoc* kepada masyarakat terkait ketentuan pemberian suara oleh masyarakat. Sebab menurutnya, di sebagian masyarakat masih menganggap bahwa ketentuan bagi pemilih adalah menunggu undangan tertulis dari panitia pemilihan.

Sosialisasi ini berkaitan erat dengan pendidikan politik. Kualitas partisipasi politik tidak hanya bergantung pada motivasi individu, tetapi juga pada pemahaman politik yang diperoleh baik secara formal maupun informal. (Rahmiyati Mii, 2023) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam politik harus didasari oleh kesadaran dan pengetahuan, bukan sekadar ikut-ikutan. Dengan demikian, partisipasi politik santri tidak hanya dipengaruhi oleh nilai agama, tetapi juga oleh pendidikan dan informasi politik yang mereka akses, termasuk dari media sosial. Maka penguatan literasi politik di pesantren menjadi kebutuhan strategis dalam mempersiapkan santri sebagai warga negara yang aktif dan reflektif.

Berbeda dengan penelitian (Rismawati & Adi, 2022) yang menekankan peran dominan struktur sosial seperti pengaruh kiai, jaringan pesantren, dan dinamika politik lokal dalam membentuk perilaku politik santri, penelitian ini menyoroti pentingnya internalisasi nilai-nilai agama sebagai kontribusi alternatif dalam membangun partisipasi politik santri. Temuan Rismawati & Adi menunjukkan bahwa relasi kekuasaan dan otoritas di lingkungan pesantren memiliki pengaruh signifikan terhadap preferensi politik santri, sehingga memperkuat argumen bahwa pemahaman agama secara personal belum cukup untuk membentuk partisipasi politik yang mandiri. Meskipun pengaruh kiai tetap relevan dan kuat dalam budaya pesantren, penelitian ini memberikan tambahan dimensi bahwa kesadaran politik santri juga dapat tumbuh melalui proses internalisasi nilai agama yang diperoleh dari pendidikan dan pengalaman pribadi.

Selaras dengan itu, perilaku memilih santri sebagai salah satu indikator dari partisipasi politik juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural dari suatu organisasi kemasyarakatan yang aktif berperan di bidang sosial dan politik sebagaimana dikemukakan oleh (Arravi, 2021). Organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama turut memengaruhi preferensi politik mereka. Dengan demikian, pilihan politik santri tidak semata berdasarkan pemahaman agama secara kognitif, tetapi juga dibingkai oleh identitas kultural dan struktur sosial di lingkungannya. Manakala lingkungannya

berorientasi pada salah satu kelompok organisasi kemasyarakatan tertentu atau bahkan mereka menjadi bagian dari organisasi tersebut baik secara struktural maupun kultural, maka mereka memiliki kecenderungan preferensi politik sesuai dengan organisasinya. Maka dalam pelaksanaan partisipasi politiknya, faktor ini menjadi lebih dominan daripada yang lainnya.

Secara praktis, hasil penelitian ini mendorong pentingnya formulasi kebijakan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan dengan nilai-nilai keagamaan di lingkungan pesantren. Pengasuh dan pendidik di pesantren dapat merancang program pembelajaran kontekstual yang mengaitkan ajaran Islam dengan isu-isu kenegaraan dan demokrasi. Misalnya, melalui pelatihan pemilu simulatif, diskusi kebijakan publik berbasis nilai Islam, atau kajian kitab yang difokuskan pada aspek kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Langkah ini dapat dikembangkan menjadi model pendidikan politik pesantren yang berbasis nilai spiritual dan kesadaran kebangsaan. .

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati dalam menafsirkan hasilnya. Pertama, studi ini hanya dilakukan pada satu lokasi, yaitu di Pesantren KH. Zainal Musthafa Sukamanah, sehingga temuan belum dapat digeneralisasikan ke seluruh pesantren di Indonesia. Kedua, jumlah responden terbatas pada 64 santri, yang meskipun mencukupi untuk analisis korelasi, namun belum merepresentasikan variasi latar belakang sosial yang lebih luas. Ketiga, penelitian ini hanya berfokus pada satu variabel prediktor, yaitu pemahaman agama, tanpa menelusuri pengaruh faktor lain seperti sosialisasi politik, pengaruh tokoh agama secara langsung, atau akses terhadap informasi politik. Oleh karena itu, studi lanjutan disarankan menggunakan pendekatan multivariat dan populasi yang lebih luas agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika partisipasi politik santri.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis korelasi, terdapat hubungan positif dan signifikan antara pemahaman agama dan partisipasi politik santri di Pesantren KH. Zainal Musthafa Sukamanah Kabupaten Tasikmalaya. Meskipun kekuatan korelasinya tergolong lemah, temuan ini menunjukkan bahwa santri dengan tingkat pemahaman agama yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi, khususnya sebagai pemilih pemula. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan agama di pesantren tidak hanya membentuk dimensi spiritual dan moral, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kesadaran politik. Secara praktis, hasil ini mendukung perlunya integrasi pendidikan politik dalam kurikulum pesantren yang berbasis nilai-nilai keagamaan. Secara metodologis, hasil ini menunjukkan pentingnya penggunaan pendekatan multivariat dalam studi lanjutan untuk mengidentifikasi determinan lain yang memengaruhi perilaku politik santri secara lebih komprehensif. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkuat wacana demokrasi berbasis nilai keagamaan melalui pendekatan kuantitatif berbasis komunitas pesantren.

Referensi

- Achmad, Rahmah, A., & Pisyah, A. (2023). Peran Agama Dalam Membentuk Identitas Sosial. *maryamsejahtera.com*. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.754>
- Akmal, S., Sianipar, S. B., Surdikina, N., & Hutabarat, Y. D. (2024). Interaksi agama dan politik di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(1), 117–123. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11417271>
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Arravi, M. A., -, K. -, & Martini, R. -. (2021). Partisipasi Politik Dan Perilaku Memilih Santri Di Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Lasem Kabupaten Rembang Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. *Journal of Politic and Government Studies*, 10(3), 311-327. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/31397>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Eviany, E. (2019). *Pengantar ilmu politik dan ruang lingkupnya*. CV Cendekia Press.
- Fahmi, K. (2016). Prinsip kedaulatan rakyat dalam penentuan sistem pemilihan umum anggota

- legislatif. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 119. <https://doi.org/10.31078/jk735>
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). (2022). *The global state of democracy report 2022: Forging social contracts in a time of discontent*. <https://www.idea.int/democracytracker/gsd-report-2022>
- Irawan, D. (2022). Fungsi dan peran agama dalam perubahan sosial individu dan masyarakat. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 125–135. <https://doi.org/10.37567/borneo.v2i2.1255>
- Jayanti, E. D. (2025). Hubungan agama dan negara dalam pemikiran politik Islam. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 3273–3281. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.848>
- Lavan, Y. O. (2021). Implementation of Islamic values in Indonesian political dynamics. *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 53–66. <https://doi.org/10.34001/intelegensia.v9i1.2042>
- Manalu, M. C., & Halking. (2024). Partisipasi Politik Masyarakat Kelas Bawah Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024 (Studi Kasus: Masyarakat Pinggiran Sungai Deli). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2), 48–59. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v8i2.7748>
- Mantalean, V., & Prabowo, D. (2024). KPU: Partisipasi pemilih Pilpres 2024 81,78 persen. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/05/13452691/kpu-partisipasi-pemilih-pilpres-2024-8178-persen>
- Muhamad, A., Ghafur, A., Syaripulloh, & Khalimi. (2024). Uncovering the relationship between political policy and religious understanding with political participation: A historical approach. *International Journal of Religion*, 5(11), 6853–6865. <https://doi.org/10.61707/vwd7q414>
- Muhamad, N. (2023). KPU: Pemilih Pemilu 2024 didominasi oleh kelompok Gen Z dan Milenial. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id>
- Rahawarin, Z. A. (2019). Pesantren as the basis of development of political ideology in the digital era. *Dinamika Ilmu*, 19(2), 363–375. <https://doi.org/10.21093/di.v19i2.3917>
- Rahmiyati Mii, Mohamad Reza, & Firman Latuda. (2023). Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 3(2), 139-153. Retrieved from <https://e-journal.iyb.ac.id/index.php/jgp/article/view/367>
- Rismawati, S. (2021). Analisis Perilaku Politik Santri Pondok Pesantren Qomaruddin Bungah dalam Pemilihan Bupati Gresik 2020. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 10(3), 555–569. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n3.p555-569>
- Rowa, H. (2015). *Demokrasi dan kebangsaan Indonesia*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Sihombing, S. R., Hodriani, H., & Alhudawi, U. (2023). Memperkuat Civic Engagement Pada Generasi Muda. *Pancasila and Civics Education Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.30596/pcej.v2i2.16044>
- Sika, N. (2016). *Youth civic and political engagement in Egypt: From abstention to activism*. Arab Transformations Working Paper No. 9. University of Aberdeen. https://www.researchgate.net/publication/308791900_Youth_Civic_and_Political_Engagement_in_Egypt
- Sonjaya, A., & Rahayu Diningrat, B. (2023). Relasi agama dan politik di Indonesia. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 5(1), 21–28. <https://doi.org/10.51486/jbo.v5i1.82>
- Sunaryo, S. (2020). Meninjau kembali hubungan agama dan politik dalam kerangka demokrasi dan keadilan. *Dialogia*, 18(2), 276–302. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v18i2.2032>
- Yulanda, Y., Suryanef, S., Ananda, A., & Rafni, A. (2025). Kesadaran politik dan korelasinya terhadap partisipasi politik dalam pemilihan wali nagari. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 4(4), 844-853. <https://doi.org/10.24036/jecco.v4i4.317>
-